

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arba, H.M., 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachtiar Effendy, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung
- Hadi, Soetrisno, 1993, *Metodologi Research*, jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Santoso, Urip 2010, *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### Makalah/Jurnal/Artikel/Skripsi-Tesis-Desertasi:

- Aries, Dian Mujiburohman, *POTENSI PERMASALAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL)*, Bhumi volume 4 nomor 1 Mei 2018, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.



- Andriani, Desi, 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Rangka Menjamin Kepastian hukum di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).
- Birendra, Achmad Algeria, 2015, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Dalam Pendaftaran Tanah*, (Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung).
- Darmawan, 2017, *“Identifikasi masalah dan catatan kritis: Pengalaman pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo”*, Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Gumilar, Indra, 2016, *Sistem Torrens*, Magister Administrasi Pertanahan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung.
- Guntur, I Gusti Nyoman, 2017, *Sertifikat Tanah Massal : Peluang dan Tantangan (Menuju Pendaftaran yang Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah)*.
- Kaunang, Mikha Ch., 2016, *Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Lex Crimen Vol. V No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kristiyani, Lina, 2010, *Implikasi Sistem Publikasi Negatif Dengan Unsur Positif Terhadap Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hm. 4811 Dan Hm. 4538, Hm. 4812 Dan Hm. 4547, Hm. 4813 Dan Hm. 4414 Serta Hm. 5043, Hm. 4814 Dan Hm. 4337, Hm. 4815 Dan Hm. 4403, Hm. 4816 Dan Hm. 4543 Serta Hm. 4504 Di Kelurahan Kadipiro Surakarta)*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kusumawardani, Eri, 2016, *Implementasi Asas Mutakhir Pendaftaran Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan (Studi Analisis Pemutakhiran Data Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal)*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Lusiana, 2013, *Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan”*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya).
- Ma’arif, Damayanthi Prahastini Puteri, 2017, *Implementasi Ajudikasi Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Kecamatan Wlingi)*, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah).
- Marhama, Yuni, 2019, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Banyuwangi*, (Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember).



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri

LAELATUL ANISA F, Dr.Jur., Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Murfini, Anika Selaka, 2017, *Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Ajudikasi Berdasarkan Pp No. 24 Tahun 1997*, Palu, Jurnal Legal Opinion, vol.5 no.2. Fakultas Hukum. Universitas Tadulako.
- Noni, *Prosedur Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Di Bawah Tangan*, <Http://www.repository.usu.ac.id>, diakses pada 20 januari 2020 pukul 11.30 WIB.
- Nurbaedah, *Jurnal Hukum "PENGAMBARAN AKAR PERMASALAHAN SENGKETA SUMBER DAYA AGRARIA PADA TANAH PERKEBUNAN BEKAS HAK GUNA USAHA"* Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, Vol 9, Nomor 2, diterbitkan Desember 2020.
- Prabowo, Aditya, 2016, *Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Bekas Swapraja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)*, (Surakarta :Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Ratmono, 2017, "*Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*", Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta.
- Rijal, Muhammad Fauzi, 2007, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Pada Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)
- Rizani, Putri Yane, 2015, *Peran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Bermasalah*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Rohiman, 2007, *Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Ajudikasi Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Berdasarkan Pp 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rosawati, Tuti, 2010, *Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2096.K/PDT/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4-X.C-2005 tanggal 14 Juli 2005)*, (Jakarta: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Supono, Toni Agus dan Eka Askafi, "*POLC Sebagai Strategi SDM Dalam Percepatan Program PTSL pada BPN Kabupaten Kediri*" vol 1 no 1 juli 2020 Universitas Islam Kadiri (UNISKA)
- Suyuti, Ahmad Ihsan, 2011, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Program Lmpdp (Land Management And Policy Development Project) Di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kediri

LAELATUL ANISA F, Dr.Jur., Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Tunardy, Wibowo, *Hak-Hak Atas Tanah*, <http://www.jurnalhukum.com/hak-hak-atas-tanah/>  
Diakses Pada 20 Januari 2020 Pukul 15.06 WIB.

Wahyono, EB 2017, *“Pemikiran pengembangan SKKNI-IG untuk surveyor kadastral”*,  
Prosiding seminar nasional percepatan pendaftaran tanah di Indonesia: Tantangan  
pelaksanaan PTSL dan respon solusinya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN),  
Yogyakarta.

Wardhani, Shinta Novi, 2018, *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan  
Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*, Surabaya, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 21,  
No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.

Warsono, Dono Doto, 2017, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)  
Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota  
Pontianak)*, (Pontianak: Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura)

Widayanti, Fitro, 2015, *Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa)*, Fakultas  
Hukum, Universitas Airlangga.

Widyawati, 2010, Tesis: *“PPh dan BPHTB Terhutang Atas Tanah dan atau Bangunan”*,  
(Surabaya: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga).

Yulianti, Siti Prihatin, 2008, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Pengaruhnya  
Terhadap Tertib Pertanahan (Studi di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat)*, (Semarang:  
Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro).

Yunian, Rizky, 2017, *Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Proses Pendaftaran  
Tanah Di Kabupaten Klaten*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam  
Indonesia)

Alamsyah, Ichsan Emerald, *“BPN Serahkan 13.882 Sertifikat Tanah di Kediri”*  
<https://republika.co.id/berita/qhsgxb349/bpn-serahkan-13882-sertifikat-tanah-di-kediri>  
diakses pada 20 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

Badan Pertanahan Nasional, *“Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali”*,  
<http://www.bpn.go.id>, diakses 20 Januari 2020 pukul 11:45 WIB.

Chandra Iswinarno, *“Geger Sengketa Lahan, Warga Kabupaten Kediri Ancam Bakal Boikot  
Pilkada”* <https://jatim.suara.com/read/2020/03/10/183216/geger-sengketa-lahan-warga-kabupaten-kediri-ancam-bakal-boikot-pilkada?page=all>  
diakses pada 20  
Februari 2021 pukul 10:30 WIB.

Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, *“Program PTSL  
Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target”*

[https://kominform.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel\\_gpr](https://kominform.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr) diakses pada 20 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Jokowi Serahkan 1 Juta Sertifikat Tanah Untuk Rakyat” <https://setkab.go.id/presiden-targetkan-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat-pada-2025/> diakses pada 21 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

Hutapea, Erwin, “Tak Selalu Berjalan Mulus, Pendaftaran Tanah Terkendala Empat Hal”, <https://properti.kompas.com/read/2018/12/17/183000721/tak-selalu-berjalan-muluspendaftaran-tanah-terkendala-empat-hal?page=all> diakses pada 13 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 24 Desember 2021 pukul 12.00 WIB.

Madani, “Kepala BPN Kediri serahkan sertifikat PTSL” <https://beritamadani.co.id/2020/10/bupati-bersama-kepala-bpn-kab-kediri-telah-serahkan-13-sertifikat-dari-29-274-yang-diajukan/> diakses pada 12 Januari 2021 pukul 11.00 WIB

Octara, Diko “2025 Sofyan Djalil :Semua Tanah Di Luar Hutan Bersertifikat” [.Http://www.bisnis.tempo.co](http://www.bisnis.tempo.co), diakses pada 20 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

Pemerintah Kabupaten Kediri, *Google Gambar*, “Wilayah Peta Kabupaten Kediri”, diakses dari <https://kedirikab.go.id/geografis> , diakses pada 1 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Kediri, *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kediri* <https://kedirikota.bps.go.id/indicator/26/237/1/indeks-pembangunan-manusia.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

Pemerintah Kabupaten Kediri, *Komposisi Penduduk Kota Kediri berdasarkan tingkat pendidikan* <https://www.kedirikota.go.id/page/profil/5> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, “Wilayah Peta Kabupaten Kediri”, [https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkedirikab.go.id%2Fgeografis&psig=AOvVaw1CHe4Bit796323lbq83Fnk&ust=1625617623476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQ3YkBahcKEwjQ\\_ondl83xAhUAAAAAHQAAAAAQAw](https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkedirikab.go.id%2Fgeografis&psig=AOvVaw1CHe4Bit796323lbq83Fnk&ust=1625617623476000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQ3YkBahcKEwjQ_ondl83xAhUAAAAAHQAAAAAQAw), diakses pada 1 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB.

Saichu, Achmad, “Bupati Kediri Serahkan Sertifikat Tanah Untuk Peserta PTSL” <https://koranmemo.com/bupati-kediri-serahkan-sertifikat-tanah-untuk-peserta-pts-l/> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 10:30 WIB.

Sanjaya, Adhi, *Langkah dan Syarat Mengurus Sertipikat Tanah*. <Http://www.bogor.tribunnews.com>. Di akses pada 21 Januari pukul 10.00 WIB.

Warsono, Hari Tri, “Bersengketa Lahan, Warga Ngancar Gugat PTPN XII” <https://nasional.tempo.co/read/289433/bersengketa-lahan-warga-ngancar-gugat-ptpn-xii/full&view=ok> diakses pada 20 Februari 2021 pukul 10:30 WIB.



---

*Biaya PTSL di Desa Kayunan Melebihi Perbup Kediri*  
<https://lenteratoday.com/biaya-pts-l-di-desa-Kayunan-melebihi-perbup-kediri/> diakses tanggal 12 februari 2021 pukul 11.00 WIB

---

*BPN Kabupaten Kediri Serahkan Ratusan Sertifikat Tanah kepada Warga Desa Ngadi*  
<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bpn-kabupaten-kediri-serahkan-ratusan-sertifikat-tanah-kepada-warga-desa-ngadi/> diakses tanggal 12 februari 2021 pukul 11.00 WIB

---

*“Program Sertifikat Massal di Kabupaten Kediri Dipertanyakan? Kenapa BPN Tertutup Untuk Media”*  
<https://duta.co/program-sertifikat-massal-di-kabupaten-kediri-dipertanyakan-kenapa-bpn-tertutup-untuk-media> diakses 10 Mei 2021 pukul 20.00 WIB

---

*PTSL 2021: Pengertian, Syarat, dan Cara Membuatnya”*  
<http://www.okeproperti.co.id/pts-l-2021-pengertian-syarat-dan-caramembuatnya/#:~:text=Program%20PTSL%20gratis%20sempat%20tertimpa,terintegrasi%20dan%20bebas%20dari%20sengketa> diakses pada 20 Februari 2021 pukul 21.20 WIB

---

*PTSL beda dengan PRONA, ini perbedaannya.* <Http://www.kanalindonesia.com>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 12.00 WIB.

---

*Rata-rata Lama Sekolah Masyarakat Kabupaten Kediri*  
<https://kedirikota.bps.go.id/indicator/26/250/1/rata-rata-lama-sekolah.html> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka., Jakarta.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan*

*Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang *Pertimbangan Teknis Pertanahan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang *Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia*

Ruang Lingkup dalam Petunjuk Teknis Kementerian ATR/BPN No. 1069/3.1-100/IV/2018 Tentang *Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018*

Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikenal dengan SKB 3(tiga) Menteri No. 25/SKB/V/2017 Tentang *Pembiayaan Persiapan Pendaftaran*

Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang *Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 11 Tahun 2018 Tentang *Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dibebankan Kepada Masyarakat*